

# Relevansi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam sejarah perumusan Pancasila

**Sarah Khairunnisa Basuki**

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail : 250501110071@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Bhinneka tunggal ika, pancasila, ideologi bangsa, persatuan, integritas

## Keywords:

Bhinneka tunggal ika, pancasila, national ideology, unity, integrity

## ABSTRAK

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna filosofis yang mendalam sebagai dasar persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Semboyan ini tidak hanya menjadi simbol kenegaraan, tetapi juga berperan penting dalam proses perumusan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika terhadap sejarah lahirnya Pancasila serta implikasinya dalam kehidupan berbangsa di era modern. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan analisis kualitatif deskriptif berdasarkan berbagai jurnal terindeks nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti

toleransi, musyawarah, gotong royong, dan persatuan yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika menjadi fondasi moral dalam perumusan Pancasila. Namun, di era globalisasi dan digitalisasi, nilai-nilai tersebut mulai mengalami degradasi akibat krisis integritas, intoleransi, serta lemahnya pendidikan karakter. Oleh karena itu, revitalisasi nilai Bhinneka Tunggal Ika melalui pendidikan, keteladanan moral, dan penguatan literasi Pancasila menjadi langkah strategis dalam menjaga persatuan dan integritas bangsa.

## ABSTRACT

The motto Bhinneka Tunggal Ika (Unity in Diversity) holds a profound philosophical meaning as the foundation of Indonesia's unity within diversity. It serves not only as a national emblem but also plays a crucial role in the formulation of Pancasila as the nation's ideological foundation. This study aims to examine the relevance of Bhinneka Tunggal Ika values to the historical development of Pancasila and their implications for national life in the modern era. The research employs a qualitative descriptive method through library research, drawing upon various nationally indexed journals. The findings indicate that values such as tolerance, deliberation, mutual cooperation, and unity embodied in Bhinneka Tunggal Ika form the moral basis of Pancasila's formulation. However, in the current era of globalization and digitalization, these values have gradually diminished due to integrity crises, intolerance, and weak character education. Therefore, revitalizing Bhinneka Tunggal Ika through education, moral leadership, and strengthened Pancasila literacy is essential to preserve national unity and moral integrity.

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman luar biasa, baik dari segi suku bangsa, bahasa, adat istiadat, maupun keyakinan. Dalam hal ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu menjadi dasar filosofis penting dalam menjaga persatuan di tengah kemajemukan bangsa. Semboyan ini pertama kali muncul dalam Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

masa Majapahit, yang mengandung pesan toleransi dan kesatuan spiritual antara pemeluk ajaran Siwa dan Buddha. Nilai ini kemudian diadopsi menjadi semboyan negara Indonesia sebagai penegasan identitas nasional yang plural, namun tetap berpijak pada satu tujuan bersama yakni persatuan bangsa. Dalam sejarah perumusan dasar negara, nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika memainkan peran penting. Ketika para pendiri bangsa merumuskan Pancasila melalui sidang-sidang BPUPKI dan Panitia Sembilan, semangat kebhinekaan menjadi landasan bagi kompromi politik dan kultural antar golongan. Semboyan ini berfungsi sebagai pengikat antara berbagai ideologi yang berkembang pada masa itu nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme hingga akhirnya melahirkan Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif dan universal (Putri et al., 2025).

Pancasila lahir dari kesadaran historis bahwa Indonesia tidak dapat berdiri hanya atas satu kelompok, agama, atau ideologi tertentu. Ia merupakan hasil konsensus luhur dari keberagaman pemikiran para pendiri bangsa. Menurut (Baihaqi, 2023), Pancasila memiliki fungsi ganda, yakni sebagai ideologi pemersatu bangsa dan dasar filosofis dalam membangun sistem kenegaraan. Di sisi lain, Bhinneka Tunggal Ika melengkapi Pancasila sebagai semboyan yang menegaskan karakter bangsa Indonesia yang plural namun tetap bersatu. Artinya, antara Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat relasi historis dan filosofis yang tidak dapat dipisahkan. Dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, (Vitaloka, 2025) menegaskan bahwa pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat merupakan bentuk aktualisasi dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia yang majemuk hanya dapat hidup harmonis apabila menjunjung tinggi nilai toleransi, gotong royong, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar simbol, melainkan refleksi nyata dari nilai-nilai praksis Pancasila yang hidup dalam keseharian rakyat Indonesia.

Selain itu, Annabilah (2024) dalam kajiannya mengenai Implementasi Nilai Praksis Pancasila pada Kehidupan Sehari-hari menekankan bahwa nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial tidak dapat dilepaskan dari semangat keberagaman yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai tersebut menjadi dasar pembentukan karakter bangsa yang menjunjung perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman. Sementara itu, (Abdillah & Firdaus, 2025) menunjukkan bagaimana nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika juga dapat diadaptasi dalam era digital. Melalui penelitian mereka tentang Penerapan Nilai Pancasila dalam Ekosistem Ekonomi Digital, mereka menegaskan bahwa semangat persatuan dan keadilan sosial harus menjadi pedoman bagi pelaku ekonomi digital di Indonesia, agar transformasi teknologi tetap berlandaskan nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Dengan demikian, relevansi semboyan Bhinneka Tunggal Ika melampaui analisa historis, tetapi juga terus hidup dan berkembang sesuai zaman. Dalam dunia pendidikan, (Ita'ufaidillah, 2024) menegaskan pentingnya pendidikan Pancasila sejak jenjang sekolah dasar untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, pendidikan Pancasila menjadi instrumen penting dalam membangun karakter peserta didik agar memiliki kesadaran multikultural, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian (Saniyah, 2024) yang menyoroti Urgensi Penanaman Nilai Pancasila pada Siswa Sekolah Dasar untuk memperbaiki moral bangsa. Ia menegaskan bahwa krisis moral yang terjadi di masyarakat saat ini dapat diatasi

melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila yang berakar pada semboyan persatuan dalam keberagaman.

Sementara itu, (Ramadhani, 2025) dalam kajiannya tentang Identitas Nasional dan Pancasila dalam Pengembangan Karakter Bangsa menyebut bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah bagian integral dari identitas nasional Indonesia. Nilai ini bukan sekadar moto, tetapi juga fondasi dalam membentuk karakter bangsa yang kuat, toleran, dan berorientasi pada kemanusiaan universal. Ia menegaskan bahwa dalam era globalisasi dan modernisasi, semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi alat penyeimbang antara keterbukaan global dan jati diri bangsa. Lebih lanjut, (Rahmawati, 2025) melalui Analisis Filosofis Perbandingan Pancasila dengan Ideologi-ideologi Dunia menguraikan bahwa Pancasila memiliki keunikan dibanding ideologi lain karena bersifat inklusif dan kontekstual terhadap kondisi sosial-budaya Indonesia. Nilai Bhinneka Tunggal Ika menjadi penguat sifat inklusivitas ini, sebab sejak awal perumusannya, Pancasila tidak dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan, melainkan mengintegrasikannya dalam satu cita bersama. Dalam hal ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai landasan moral bagi proses kompromi ideologis yang melahirkan Pancasila.

(Maulidiyah, 2025) juga menegaskan adanya Harmoni Nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila dan Islam. Ia menunjukkan bahwa nilai persatuan dalam Pancasila bersumber pada semangat ukhuwwah (persaudaraan) dalam Islam yang juga sejalan dengan makna Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan tidak dapat dilepaskan dari akar filosofis yang sama, yaitu keinginan untuk mempersatukan perbedaan demi keadilan dan kemaslahatan bersama. Kaitannya dengan aspek moral dan integritas bangsa, (Nurhalizah, 2025) dalam Pancasila dan Korupsi menyoroti bagaimana penyimpangan nilai-nilai Pancasila berkontribusi pada meningkatnya praktik korupsi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa krisis moral ini muncul karena lunturnya nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan persatuan. Penguatan kembali semangat Bhinneka Tunggal Ika dianggap sebagai cara untuk menumbuhkan solidaritas sosial dan kesadaran kolektif, sehingga dapat mengurangi perilaku individualistik yang menjadi akar korupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Relevansi Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam Sejarah Perumusan Pancasila.”**

Judul ini dipilih karena peneliti melihat bahwa Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya berfungsi sebagai semboyan kenegaraan, melainkan juga memiliki makna filosofis yang mendalam dan berkaitan erat dengan proses lahirnya Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan tersebut, seperti toleransi, persatuan, dan penghargaan terhadap perbedaan, menjadi cerminan nyata dari sila-sila dalam Pancasila, terutama sila ketiga “Persatuan Indonesia.”

## Pembahasan

### Nilai Persatuan dalam Keberagaman sebagai Landasan Perumusan Pancasila

Sejarah menunjukkan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar ungkapan simbolik, melainkan representasi konkret dari identitas bangsa Indonesia. Nilai yang terkandung di dalamnya “berbeda-beda tetapi tetap satu” menjadi fondasi bagi proses perumusan Pancasila. Pada masa sidang BPUPKI tahun 1945, para pendiri bangsa dihadapkan pada perbedaan pandangan yang tajam terkait dasar negara. Namun, semangat kebersamaan dan penghargaan terhadap perbedaan yang diilhami oleh Bhinneka Tunggal Ika memungkinkan tercapainya kompromi nasional yang melahirkan Pancasila.

Menurut (Baihaqi, 2023) dalam Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Pemersatu Bangsa Indonesia, perumusan Pancasila mencerminkan semangat konsensus yang berakar pada nilai kebhinekaan Nusantara. Ia menegaskan bahwa keberagaman agama, budaya, dan ideologi tidak menjadi penghalang, tetapi justru menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Pancasila lahir bukan dari satu ideologi tunggal, melainkan hasil musyawarah dari berbagai pandangan yang dipersatukan oleh semangat “kesatuan dalam perbedaan.”

Fitri Annabilah (2024) menambahkan bahwa nilai praksis Pancasila yang tercermin dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti gotong royong, toleransi, dan musyawarah memiliki akar historis dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk dasar moral bangsa, tetapi juga menjadi pedoman dalam mengelola keberagaman sosial dan politik. Dengan demikian, perumusan Pancasila dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk menerjemahkan makna Bhinneka Tunggal Ika ke dalam tatanan ideologis dan kenegaraan.

### Kebhinekaan sebagai Sumber Nilai Filosofis Pancasila

Secara filosofis, Bhinneka Tunggal Ika merefleksikan pemikiran inklusif yang juga menjadi ciri khas Pancasila (Faslah, 2024). (Rahmawati, 2025) dalam penelitiannya Pancasila sebagai Dasar Ideologi Bangsa Indonesia: Analisis Filosofis Perbandingan dengan Ideologi-ideologi Dunia menjelaskan bahwa tidak seperti ideologi Barat yang cenderung monolitik, Pancasila bersifat terbuka dan adaptif terhadap perbedaan nilai budaya dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa semangat kebhinekaan telah mengakar dalam perumusan Pancasila, menjadikannya ideologi yang mampu menampung keberagaman tanpa kehilangan arah moral.

Dalam perspektif yang sama, (Maulidiyah, 2025) melalui artikelnya Harmoni Nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila dan Islam menegaskan bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika sejalan dengan nilai-nilai universal dalam ajaran Islam yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan. Integrasi nilai keislaman dan kebangsaan inilah yang memperkuat fondasi etika Pancasila. Ia menegaskan bahwa harmoni antara agama dan kebangsaan menjadi bukti bahwa Bhinneka Tunggal Ika berperan sebagai jembatan moral yang mempersatukan perbedaan keyakinan dalam semangat keindonesiaan.

Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan pemersatu, tetapi juga sumber nilai filosofis yang memberi karakter unik pada Pancasila. Ia menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia tidak mendirikan negara atas dasar homogenitas, melainkan atas dasar pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman.

### **Pendidikan dan Penanaman Nilai Kebhinekaan sebagai Implementasi Historis**

Nilai kebhinekaan yang menjadi ruh Pancasila tidak akan hidup tanpa proses pendidikan yang sistematis. Menurut (Ita'ufaidilah, 2024) dalam Pentingnya Pendidikan Pancasila bagi Jenjang Sekolah Dasar, penanaman nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika sejak dini merupakan langkah strategis dalam membangun karakter bangsa yang toleran. Ia menegaskan bahwa peserta didik perlu memahami bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan kekuatan untuk membangun persatuan.

(Saniyah, 2024) dalam kajiannya Urgensi Penanaman Nilai Pancasila kepada Siswa Sekolah Dasar Guna Memperbaiki Moral Bangsa memperkuat pandangan tersebut dengan menyoroti degradasi moral generasi muda akibat lemahnya internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Ia menegaskan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mampu menjadi benteng terhadap arus globalisasi yang cenderung individualistik dan hedonistik.

Dalam ranah yang lebih luas, (Ramadhani, 2025) melalui artikelnya Identitas Nasional: Pancasila dalam Rangka Pengembangan Karakter Bangsa menekankan bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika merupakan bagian integral dari identitas nasional. Ia menegaskan bahwa tanpa pemahaman terhadap kebhinekaan, pembentukan karakter bangsa akan kehilangan arah moral dan etika. Maka, pendidikan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila perlu selalu dikaitkan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika agar tidak hanya menjadi hafalan, tetapi menjadi sikap hidup yang membumi.

Arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat membawa perubahan signifikan terhadap perilaku sosial dan orientasi moral masyarakat Indonesia. Di satu sisi, kemajuan informasi membuka akses terhadap pengetahuan dan interaksi lintas budaya, namun di sisi lain melahirkan krisis integritas dan lunturnya semangat kebhinekaan yang menjadi identitas bangsa. Semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan pentingnya persatuan dalam perbedaan perlahan terkikis oleh meningkatnya egoisme, pragmatisme, serta menurunnya kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Fenomena korupsi, intoleransi, dan polarisasi sosial menunjukkan bahwa masyarakat mulai menjauh dari semangat moral yang dulu menjadi fondasi berdirinya bangsa Indonesia.

Menurut (Nurhalizah, 2025) dalam penelitiannya Pancasila dan Korupsi, krisis integritas yang melanda berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem hukum, tetapi juga oleh menurunnya kesadaran moral. Ketika nilai kejujuran dan tanggung jawab diabaikan, perilaku menyimpang seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tumbuh subur. Kondisi ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika seperti rasa tanggung jawab sosial dan gotong royong tidak lagi diinternalisasi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Padahal, semangat persatuan dalam keberagaman menuntut kesadaran kolektif bahwa kepentingan bersama harus ditempatkan di atas kepentingan individu.

Fenomena lain yang memperparah krisis kebhinekaan adalah meningkatnya intoleransi sosial di ruang publik, terutama di media digital. (Qalbi et al., 2024) menjelaskan bahwa penyebaran ujaran kebencian, diskriminasi agama, dan polarisasi politik menjadi gejala nyata dari melemahnya penghayatan terhadap sila kedua dan ketiga Pancasila. Ketika masyarakat kehilangan empati dan toleransi terhadap perbedaan, makna Bhinneka Tunggal Ika tereduksi menjadi slogan tanpa implementasi. Nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi landasan kebangsaan tergantikan oleh fanatisme kelompok yang menimbulkan konflik horizontal.

Lebih lanjut, (Baihaqi, 2023) menyoroti bahwa lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran nilai-nilai kebangsaan memperburuk keadaan. Ketidaktegasan dalam menindak kasus intoleransi atau korupsi menciptakan persepsi publik bahwa pelanggaran moral dapat ditoleransi. Ketika keadilan tidak ditegakkan secara konsisten, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap negara, dan semangat persatuan bangsa menjadi tergerus. Nilai integritas yang seharusnya menjadi pilar kebhinekaan berubah menjadi formalitas belaka tanpa substansi moral.

Krisis integritas juga terlihat pada tataran kepemimpinan. Ahmad Arif Nahidl (Ramdlany, 2024) dalam Kepemimpinan Berbasis Nilai-nilai Pancasila menegaskan bahwa lunturnya keteladanan moral di kalangan elite menjadi penyebab melemahnya moralitas publik. Pemimpin yang tidak berpegang pada prinsip kejujuran dan keadilan akan menulari masyarakat dengan perilaku permisif terhadap penyimpangan. Padahal, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika menuntut kepemimpinan yang mampu mempersatukan perbedaan dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika figur publik tidak lagi menjadi panutan etika, kepercayaan sosial pun menurun, dan kohesi kebangsaan semakin rapuh.

Selain faktor moral dan hukum, globalisasi digital turut memengaruhi lunturnya semangat kebhinekaan. Abyannabil Abdillah dan Muhammad Hanif Firdaus (2025) mengemukakan bahwa budaya digital telah menggeser orientasi masyarakat dari nilai-nilai kolektif menjadi individualistik. Platform media sosial sering kali menjadi ruang penyebaran polarisasi dan provokasi identitas, bukan sarana memperkuat persatuan. Generasi muda lebih banyak menyerap nilai-nilai pragmatis dan konsumtif yang berasal dari budaya luar tanpa disaring dengan nilai-nilai Pancasila. Akibatnya, makna keberagaman yang selama ini dijunjung tinggi justru bergeser menjadi alat perpecahan di dunia maya.

Rendahnya literasi nilai kebangsaan memperparah kondisi tersebut. (Ita'ufaidilah, 2024) dan (Saniyah, 2024) sama-sama menegaskan bahwa pendidikan Pancasila di jenjang dasar merupakan kunci utama untuk membentuk karakter bangsa yang berintegritas dan menghargai perbedaan. Namun, pendidikan nilai sering kali masih bersifat teoritis, belum menyentuh dimensi praksis dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, generasi muda memahami Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika hanya sebatas hafalan, bukan pedoman moral. Dalam konteks ini, krisis integritas dan lunturnya semangat kebhinekaan bukan sekadar persoalan sosial, tetapi juga krisis pendidikan karakter nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa krisis integritas dan menurunnya semangat kebhinekaan merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan persatuan bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dahulu menjadi perekat ideologis dan moral kini menghadapi tantangan besar di tengah globalisasi nilai. Revitalisasi Pancasila dan penguatan pendidikan karakter menjadi langkah strategis untuk mengembalikan makna sejati kebhinekaan sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Krisis Integritas dan Lunturnya Kebhinekaan

1. Lunturnya nilai kebersamaan dan gotong royong  
Masyarakat cenderung mengedepankan kepentingan individu dan materi dibandingkan kepentingan sosial, menyebabkan solidaritas dan empati sosial menurun drastis.
2. Meningkatnya polarisasi sosial dan intoleransi  
Polarisasi berbasis agama, politik, dan identitas menjadi ancaman nyata terhadap persatuan nasional
3. Lemahnya penegakan hukum dan etika publik  
Ketidaktegasan aparat negara dalam menegakkan nilai keadilan menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
4. Minimnya keteladanan moral dari pemimpin publik  
Hilangnya figur pemimpin berintegritas memperburuk moralitas sosial dan memperlemah nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika
5. Pengaruh globalisasi dan disinformasi digital  
Media digital kerap dimanfaatkan untuk menyebarkan ujaran kebencian dan membentuk opini yang memecah belah
6. Rendahnya literasi nilai Pancasila dan kebangsaan  
Pendidikan nilai yang belum menyentuh aspek praksis membuat generasi muda kurang memahami makna kebhinekaan sebagai landasan kehidupan sosial

Menurut (Putri et al., 2025), Dengan Melalui refleksi dan penafsiran ulang yang berkelanjutan, Pancasila akan semakin mampu menjawab tantangan zaman serta mempersatukan bangsa dalam semangat nilai-nilai dasarnya. Pendekatan ini tidak hanya melestarikan makna Pancasila, tetapi juga memastikan nilai-nilainya terus hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang. Sebagai contoh dalam risetnya (Adityo, 2022) yang menyoroti perlunya pendekatan penyuluhan terhadap mahasiswa guna menambah wawasan pengetahuan dan penguatan dasar negara. Penelitian ini membuktikan bahwa dengan menyampaikan materi, gagasan atau ide secara lisan tentang dinamika Sejarah Pancasila dapat menambah wawasan peserta terhadap pentingnya menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Melalui kegiatan penyuluhan tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami Pancasila sebagai dasar negara secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, riset ini menegaskan bahwa edukasi berbasis penyuluhan memiliki peran strategis dalam membangun karakter generasi muda yang berjiwa nasionalis dan berintegritas tinggi sesuai dengan semangat Pancasila.

## Kesimpulan dan Saran

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki relevansi historis dan filosofis yang sangat kuat terhadap proses perumusan Pancasila. Nilai persatuan dalam keberagaman yang terkandung di dalamnya menjadi dasar bagi para pendiri bangsa untuk menyatukan perbedaan ideologi, agama, dan pandangan politik pada masa sidang BPUPKI. Pancasila lahir bukan dari homogenitas, melainkan dari semangat toleransi, musyawarah, dan gotong royong yang berakar pada makna Bhinneka Tunggal Ika. Dalam era kekinian, krisis integritas, intoleransi, dan lemahnya moral publik menunjukkan bahwa nilai-nilai kebhinekaan mulai luntur. Masyarakat cenderung pragmatis, individualistik, dan mudah terprovokasi oleh isu perbedaan. Hal ini menegaskan bahwa revitalisasi nilai Bhinneka Tunggal Ika sangat diperlukan agar Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologis, tetapi juga menjadi pedoman hidup bangsa yang nyata.

### Saran

#### 1. Pendidikan Karakter dan Pancasila

Nilai Bhinneka Tunggal Ika perlu diintegrasikan secara lebih kontekstual dalam pendidikan dasar dan menengah agar generasi muda memahami makna keberagaman sebagai kekuatan, bukan perbedaan yang memecah.

#### 2. Teladan Kepemimpinan Berbasis Nilai Pancasila

Pemimpin di semua level harus menjadi contoh nyata dalam menegakkan kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi agar semangat kebhinekaan tercermin dalam kebijakan publik.

#### 3. Revitalisasi Nilai di Era Digital

Literasi digital berbasis nilai Pancasila perlu diperkuat untuk menekan polarisasi, ujaran kebencian, dan disinformasi yang mengancam persatuan nasional.

#### 4. Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Pemerintah harus menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap pelanggaran nilai kebangsaan agar masyarakat kembali percaya pada negara sebagai penjaga integritas dan keadilan sosial.

## Daftar Pustaka

- Abdillah, A., & Firdaus, M. H. (2025). Penerapan nilai pancasila dalam ekosistem ekonomi digital. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(2), 630–641.
- Adityo, R. D. (2022). Penguatan dasar negara melalui penyuluhan Pancasila pada mahasiswa. *Devosi*, 3(2), 1–5. <https://repository.uin-malang.ac.id/11455/>
- Baihaqi, K. (2023). Pancasila sebagai ideologi negara dan pemersatu bangsa Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(6), 694–698.
- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, Geostrategi, dan Geopolitik*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872>



- Ita'ufaidilah, S. (2024). Pentingnya pendidikan Pancasila bagi jenjang sekolah dasar. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(10), 67–70.
- Maulidiyah, S. (2025). Harmoni nilai persatuan indonesia dalam pancasila dan islam. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(6), 306–311.
- Nurhalizah, S. (2025). Pancasila dan Korupsi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(1).
- Putri, V. F. A., Pratiwi, I. H., & Hidayatullah, A. D. (2025). Kritisisme konstruktif dan dialog antar generasi: Mewujudkan Pancasila yang relevan di era globalisasi. *ARembeN Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(1), 25–34. <https://repository.uin-malang.ac.id/24556/>
- Qalbi, N. L., Adhiyya, S. F., Hafidh, E. N., & Tajalla, N. (2024). Pancasila dan hak asasi manusia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(12), 78–85.
- Rahmawati, S. (2025). Pancasila sebagai dasar ideologi bangsa indonesia: Analisis filosofis perbandingan pancasila dengan ideologi-ideologi dunia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(3).
- Ramadhani, R. N. (2025). Identitas nasional: Pancasila dalam rangka pengembangan karakter bangsa. *Maliki Interdisciplinary Journal*,.
- Ramdlany, A. A. N. (2024). Kepemimpinan berbasis nilai-nilai Pancasila. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(6).
- Saniyah, R. R. (2024). Urgensi penanaman nilai Pancasila kepada siswa sekolah dasar guna memperbaiki moral bangsa. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(5).
- Vitaloka, E. D. (2025). Implementasi nilai-nilai pancasila dalam masyarakat Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(4), 574–579.